

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENJUALAN NARKOBA

(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)

Oleh

SALSABILA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah keterlibatan Bripka N, anggota Polres Lampung Selatan, dalam tindak pidana penjualan sekaligus penggunaan narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba, serta apakah pelaksanaan PTDH dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba ditinjau dari aspek hukum administrasi dan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Divisi Propam Polres Lampung Selatan, Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor internal, seperti disiplin, integritas, dan mekanisme kode etik, serta faktor eksternal, seperti bukti penyidikan, pengawasan publik, dan penerapan regulasi, berpengaruh signifikan dalam proses penegakan hukum. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Polri. Namun, dari perspektif hukum pidana, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip *equality before the law*. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan

Salsabila

antara penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba melalui kombinasi sanksi etik dan proses pidana umum, penerapan prinsip *zero tolerance*, serta peningkatan pengawasan internal. Selain itu, regulasi mengenai mekanisme PTDH perlu ditegaskan agar bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan aspek administratif dan pidana guna mencegah terjadinya praktik diskriminasi hukum terhadap aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Polri, Narkoba

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF DISHONORABLE DISCHARGE OF INDONESIAN NATIONAL POLICE OFFICERS IN NARCOTICS TRAFFICKING CASES

(A Case Study at the South Lampung Police Resort)

By

SALSABILA

This research is motivated by the increasing number of narcotics abuse cases involving not only civilians but also law enforcement officers, including members of the police force. One case examined in this study concerns the involvement of Bripka N, an officer of the South Lampung Police Resort, in the criminal act of narcotics trafficking as well as narcotics use. The main issues addressed in this research are the legal provisions governing Dishonorable Discharge (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH) of police officers involved in narcotics-related crimes and whether the implementation of PTDH in this case is in accordance with the prevailing laws and regulations. This study aims to analyze the conformity of the application of PTDH against police officers involved in narcotics crimes from the perspectives of administrative law and criminal law.

This research employs a normative-empirical juridical approach. Data sources consist of library research and field data obtained through documentation studies and interviews. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The informants in this study include representatives from the Professional and Security Division (Propam) of the South Lampung Police Resort, the Narcotics Investigation Unit of the South Lampung Police Resort, and a lecturer from the Criminal Law Department of the Faculty of Law.

The results of the study indicate that internal factors—such as discipline, integrity, and the enforcement of the police code of ethics—as well as external factors—such as investigative evidence, public oversight, and regulatory implementation—significantly influence the law enforcement process. The Dishonorable Discharge (PTDH) imposed was proven to be in accordance with statutory regulations and the professional code of ethics of the Indonesian National Police. However, from the perspective of criminal law, its

Salsabila

implementation has not been fully consistent with the principle of equality before the law. This finding highlights an imbalance between administrative law enforcement and criminal law enforcement against law enforcement officers. The study recommends strengthening law enforcement against police officers involved in narcotics crimes through a combination of ethical sanctions and general criminal proceedings, the application of a zero-tolerance principle, and enhanced internal supervision. Furthermore, regulations governing the PTDH mechanism should be clarified and made more comprehensive by integrating administrative and criminal law aspects to prevent discriminatory legal practices against law enforcement officers.

Keywords: Dishonorable Discharge, Indonesian National Police, Narcotics